

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019, mengacu kepada : (1) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2017; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawacita); (4) Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (5) dan pokok pikiran DPRD.

Tahun 2019 adalah tahun kelima dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019, merupakan tahap akselerasi. Tahap akselerasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, baik program utama maupun program pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah.

Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya. Selain itu juga untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap ke 3 (tiga) dari RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Tahun 2019 merupakan tahap akselerasi dengan tema: *"Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan"*. Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke 6 yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram. Selain untuk mendukung pelaksanaan misi 6, juga tetap memperhatikan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

Untuk mendukung tema tersebut diatas diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam Bab II buku ini.
2. Fokus pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 pada :
 - a. Peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - c. Peningkatan kualitas / derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Menurunkan jumlah rakyat miskin;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Peningkatan kemampuan keuangan daerah;
 - g. Pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah;
 - h. Optimalisasi penegakan hukum;
 - i. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
 - j. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.
3. Prioritas pembangunan Kabupaten Magelang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.
4. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan propinsi dan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Adapun tujuan dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat
Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan.
 - b. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol.
 - c. Kualitas pembangunan manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan.
 - d. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga.
 - e. Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca.
 - f. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan.
 - g. Bertambahnya kualitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan berkurangnya kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin.
 - h. Terwujudnya karakter masyarakat yang beragama, berbudaya, serta bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
 - i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan turut dalam pembangunan.
2. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah.
Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja.
 - b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal.
 - c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah.
 - d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
 - e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan.
 - g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan.
 - h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
 - i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah.
Dengan sasaran yaitu:
 - a. Aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh, dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

- c. Terpenuhi kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan.
- d. Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang perhubungan.
- 4. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan
 Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - b. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya.
 - c. Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana.
- 5. Meningkatnya manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.
 Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.
 - b. Terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal.
 - c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
 - d. Meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan.
- 6. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat serta kesadaran dan kepatuhan hukum.
 Dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
 - b. Berkurangnya Risiko bencana yang berdampak pada masyarakat.

Selengkapnya keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Visi: KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat	a. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan b. Terwujudnya Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol c. Kualitas Pembangunan Manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan. d. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan f. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkurang baik secara kualitas dan kuantitas. g. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. h. Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai nilai Pancasila i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera,

		mandiri dan turut dalam pembangunan
Misi 2: Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrument jaminan pangan pada tingkat masyarakat, e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan. h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah
Misi 3: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik, Serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru b. terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat. berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat. c. terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan d. terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan
Misi 4: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam b. terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya c. terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana
Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis	Meningkatnya manajemen dan sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah b. terwujudnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak d. meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan catatan sipil.
Misi 6: Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.. b. Berkurangnya resiko bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan :

1. Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :
 - 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
 - 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 - 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 - 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 - 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia.
 - 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
 - 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.
 - 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
 - 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2. Mendasarkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 yang diarahkan untuk pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan prioritas:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, fokus pada : Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin, Penguatan *sustainable livelihood* dan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu.
 - b. Penguatan daya saing ekonomi daerah, fokus pada: peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan, serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
 - c. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada : Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
 - d. Pengelolaan Sumberdaya Alam ingkungan Hidup dan penanggulangan bencana, fokus pada: peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.

- e. Ketahanan Pangan dan Energi, fokus pada: terwujudnya pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan terwujudnya ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan.
- f. Kesenjangan Wilayah, fokus pada: Penguatan infrastruktur, konektivitas Pemerataan, prasarana sarana dasar dan ekonomi, Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur serta Mengoptimalkan potensi kelautan.
- g. Peningkatan pelayanan publik, Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Perwujudan kelembagaan birokrasi yang professional dan Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 dan arah kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut:

4.2.1. Prioritas Pendidikan

Kebijakan pada Urusan Pendidikan diarahkan pada upaya (1) Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada:

1. Pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri.
2. Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD dan SMP melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta (dana DAK), peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta
3. Pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, SMA/SMK. Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C.
4. Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD, SMP.
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel.
6. Pendidikan Anak Usia Dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD dan peningkatan prosentase lembaga PAUD yang terakreditasi.
7. Penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.

4.2.2. Prioritas Kesehatan

Kebijakan pada Urusan Kesehatan diarahkan pada (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan; (2) Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan; (3) Peningkatan promosi kesehatan dan

perbaikan gizi masyarakat; dan (4) Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada :

1. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya melalui Pembangunan RS Kelas B.
2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin).
3. Pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap
4. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit melalui peningkatan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) dan Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komperhensif (PONEK).
5. Peningkatan kesehatan lansia melalui posyandu Lansia.
6. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
7. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
8. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
9. Pengembangan perencanaan terpadu.

4.2.3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk (1) Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial; (2) Peningkatan nilai-nilai religius dan penghargaan terhadap kearifan lokal; dan (3) Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada Tahun 2019 penanggulangan kemiskinan difokuskan pada :

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui Desa mandiri pangan, Lumbung pangan desa, PMTAS.
2. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui Kegiatan perluasan akses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C.
3. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja masyarakat.
5. Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
6. Pembangunan pedesaan dan Perkotaan melalui Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh.
7. Bantuan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial.

4.2.4. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah difokuskan pada :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Revitalisasi Pasar Tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik.

3. Pengembangan pasar bersama IKM.
4. Pengembangan Destinasi Pariwisata.

4.2.5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik

Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan pada (1) Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi; (2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan konservasi sumberdaya alam secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan; dan (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi, banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Kebijakan Urusan Perhubungan diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Pada Tahun 2019 pembangunan bidang Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik difokuskan pada :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan, Jembatan, dan irigasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi melalui Pengelolaan Aset Irigasi (PAI).
3. Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan/pedesaan.
4. Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
5. Pembangunan gedung-gedung pemerintah.
6. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

4.2.6. Prioritas Lingkungan Hidup

Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup, melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian polusi dan konservasi.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang Lingkungan Hidup difokuskan pada :

1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam melalui Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air.
2. Mempertahankan Adipura Kota Muntilan.
3. Pengelolaan sampah melalui Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
4. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

4.2.7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan difokuskan pada :

1. Terlaksananya Merit Sistem dalam Pengisian Jabatan melalui Peningkatan Manajemen Kepegawaian.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

4.2.8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana.

Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik; (2) Pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik; (3) Perlindungan masyarakat; dan (4) Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana difokuskan pada :

1. Fasilitasi Desa bersaudara (sister village)
2. Pengembangan Desa Tangguh Bencana
3. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
4. Peningkatan kualitas Jalur evakuasi.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 bisa dilihat dalam Tabel 4.2 dibawah ini

Tabel 4.2
Rencana Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2019

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
1.	Prioritas Pendidikan fokus pada : A. Pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri. B. Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD dan SMP melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta (dana DAK), peningkatan mutu sarana	a. Angka Partisipasi Kasar PAUD b. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A* c. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B* d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A* e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B* f. Terwujudnya Sekolah Unggulan* g. Penyelesaian Kerusakan ruang Kelas SD/SMP Rintisan Wajar 12 Tahun* h. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket	a. 90% b. 104,54% c. 96% d. 93,05% e. 68% f. 2 SMA, 2 SMK g. SD 84,68%, SMP 90% h. 70%	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal	Disdikbud

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta C. Pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, SMA/SMK. Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C. D. Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD, SMP. E. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel. F. Pendidikan Anak	C*** i. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C*** Murni SMA/SMK/MA/Paket C***	i. 38%		

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Usia Dini melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD.				
2.	Prioritas Kesehatan fokus pada : A. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya melalui Pembangunan RS Kelas B. B. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin). C. Pengembangan pelayanan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat	a. Pembangunan RS Type B Tahap II b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin) c. Pengembangan pelayanan puskesmas menjadi rawat inap d. Rumah Sakit Tipe D*	a. 1 paket b. 166.816 orang c. 2 puskesmas d. 1 RS	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata	a. Dinas Kesehatan b. RSUD Muntilan c. DPU PR

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	inap D. Pengembangan rumah sakit kelas D melalui Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Grabag.				
3.	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan fokus pada : A. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui Desa mandiri pangan, Lumbung pangan desa, PMTAS. B. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui Kegiatan perluasan akses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C. C. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Jaminan	a. Penguatan cadangan pangan** b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan*** c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** d. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan** e. Besaran buruh/pekerja yang menjadi peserta program BPJS** f. Prosentase Rumah layak huni g. Cakupan fasilitas	a. 64% b. 100% c. 78,68% d. 92,11% e. 71,28% f. 85% g. 100%	a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Perbaikan Gizi Masyarakat b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan d. Program Lingkungan Sehat	a. Distan dan Pangan b. Dinas Kesehatan c. Disperinnaker d. BAPPEDA dan LITBANGDA e. DPU PR

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.</p> <p>D. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja masyarakat.</p> <p>E. Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.</p> <p>F. Pembangunan pedesaan dan</p>	<p>penyediaan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi</p> <p>h. Rumah tangga berSanitasi***</p> <p>i. Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh</p>	<p>h. 84,2%</p> <p>i. 2,45%</p>	<p>Perumahan</p> <p>e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</p>	

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Perkotaan melalui Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh. G. Bantuan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial.				
4.	Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah fokus pada : A. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani B. Pengembangan Sentra Benih Ikan melalui Pembangunan/	a. Jumlah kerjasama pemasaran (kemitraan) yang terjalin* b. Nilai Tukar Petani* c. Jumlah produksi perikanan benih d. Persentase jumlah pasar dengan kategori baik* e. Obyek Wisata yang dikembangkan*	a. 5 MOU b. 106.5 point c. 2.000.000 ekor d. 81,25% e. 2 obyek	a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan d. Program	a. Distan dan Pangan b. Dispeterikan c. Disdagkop UMKM d. Disdikbud

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan C. Revitalisasi Pasar Tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik. D. Pengembangan pasar bersama IKM. E. Pengembangan Destinasi Pariwisata.			Peningkatan Sarana Perdagangan e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
5.	Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik fokus pada : A. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan, Jembatan, dan irigasi. B. Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi melalui Pengelolaan Aset Irigasi (PAI). C. Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	a. peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik b. Peningkatan Jembatan Kabupaten c. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali	a. 69,73% b. 7 lokasi c. 8 lokasi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan	a. DPU PR b. Disdagkop UMKM

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	(SPAM) perkotaan/pedesaan. D. Pembangunan gedung-gedung pemerintah. E. Advokasi dan fasilitasi pembangunan Jalur Pengurai Kawasan Artos. F. Advokasi dan fasilitasi pembangunan dan penataan Pertigaan Cangkuk (Flyover). G. Advokasi dan fasilitasi pembangunan jalan, jembatan, sabo dam, dan fasilitas lainnya yang terdampak bencana alam.	setahun d. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	d. 69,73%	Jembatan	
6.	Prioritas Lingkungan Hidup fokus pada : A. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam melalui Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air. B. Pencapaian Adipura Kota Muntilan. C. Pengelolaan sampah	a. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air*** b. Masyarakat yang menerima bantuan sarpras pengelolaan limbah cair dan padat yang tersedia c. Naiknya nilai Adipura***	a. 6% b. 6 kelompok c. Piala Adipura	a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	melalui Pembangunan TPS 3R				
7.	Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan fokus pada : A. Terlaksananya Merit Sistem dalam Pengisian Jabatan melalui Peningkatan Manajemen Kepegawaian. B. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. C. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	a. Persentase jabatan struktural dan fungsional b. Tercapainya Opini WTP c. Peningkatan PAD d. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yg ditangani e. Pemantauan Rencana Aksi Daerah-Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	a. 100% b. WTP c. 12% d. 300 obrik e. 8 laporan	a. Program Peningkatan dan Pengembangan b. Pengelolaan dan Keuangan Daerah c. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	a. BKPPD b. BPPKAD c. Inspektorat d. Bagian Organisasi e. Bappeda dan Litbangda

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	kebijakan kepala daerah. D. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).				
8.	Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana fokus pada : A. Fasilitasi Desa bersaudara (sister village) B. Pengembangan Desa Tangguh Bencana C. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) D. Peningkatan kualitas Jalur evakuasi.	a. Jumlah Desa bersaudara (pasang) b. Jumlah desa Tangguh Bencana (desa) c. Jumlah TEA d. Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	a. 3 desa b. 5 desa c. 4 unit d. 100%	a. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019, yang sejalan dengan strategi pencapaian 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) Tahun 2015-2019, prioritas nasional tahun 2019 dan arah prioritas kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Adapun keselarasan antara agenda prioritas pembangunan nasional, prioritas nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
1	Pendidikan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis <i>skill knowledge, attitude</i> , pengembangan <i>learning culture</i> , penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.	NW.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia NW.8. Melakukan revolusi karakter bangsa	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2	Kesehatan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih	NW.5 Meningkatkan kualitas hidup	Pembangunan manusia melalui pengurangan

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah <i>Open Defecation Free</i> (tidak buang air besar sembarangan).	manusia dan masyarakat Indonesia	kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
3	Penanggulangan kemiskinan	<p>Penanggulangan kemiskinan, fokus pada:</p> <p>a. Penyediaan <i>basic life access</i> untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.</p> <p>b. Penguatan <i>sustainable livelihood</i> melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan <i>start up</i> wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p> <p>c. Perkuatan basis data, basis</p>	<p>NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</p> <p>NW.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p>	Pembangunan manusia melalui Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.		
4	Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah	<p>1) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi d. Pengembangan ketenagakerjaan e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah <p>2) Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan komoditas pertanian dan pangan b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran c. Pemanfaatan lahan melalui <i>integrated farming system (IFS)</i> 	<p>NW.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis</p> <p>NW.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.</p>	<p>1. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.</p> <p>2. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.</p>

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		d. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing e. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap f. Pengembangan lumbung cadangan pangan g. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE); h. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)		
5	Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik	Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana: a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan b. Penanganan infrastruktur perhubungan c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi dan sumberdaya air lainnya d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan sampah/TPA e. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah f. Mitigasi dan penanganan bencana	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
6	Lingkungan Hidup	<p>Pengelolaan sumberdaya Alam Lingkungan Hidup dan penanggulangan bencana dengan fokus:</p> <p>a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamsi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara kornunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan</p>	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		<p>risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan system informasi penanggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.</p>		
7	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<p>Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantapan kondusivitas wilayah b. Peningkatan partisipasi masyarakat b. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi c. Gerakan revolusi mental d. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah e. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, f. keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS 	<p>NW. 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</p> <p>NW.4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</p> <p>NW.8 Melakukan revolusi karakter bangsa.</p>	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
			NW.9 Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	
8	Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana	<p>Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan b. Penanganan infrastruktur perhubungan c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi dan sumberdaya air lainnya d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di e. daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan f. sampah/TPA g. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan h. kualitas air, udara dan tanah i. Mitigasi dan penanganan bencana 	NW.1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu

4.3. POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.